

Soal Reuni 212, Wagub DKI: Sekarang Masih Pandemi

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengakui ada rencana untuk menggelar acara tahunan reuni Persatuan Alumni (PA) 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember mendatang.

Terkait hal itu, Wagub DKI Jakarta mengingatkan jika segala kegiatan berkerumunan bisa berpotensi menyebabkan penularan dan penyebaran Covid-19.

"Mohon diperhatikan sekarang masih masa pandemi Covid-19," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu (10/11).

Riza menambahkan, saat ini DKI Jakarta memang berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Sehingga, diakuinya, pihak Pemprov DKI menghormati siapapun yang ingin menggunakan

lokasi-lokasi umum di DKI, termasuk Monas.

Tetapi, Riza menegaskan meski sudah level 1 PPKM, pihaknya meminta pengertian semua pihak. Utamanya, saat kasus-kasus Covid-19 masih tetap menghantui.

"Jadi masih pandemi, harapan kami tentu tidak ada kegiatan apapun yang dapat menimbulkan kerumunan dalam jumlah yang besar," ujarnya.

Diketahui, Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif menyebut jika Reuni 212 kemungkinan akan dilaksanakan sesuai jadwal di awal Desember nanti. Meskipun, lokasi biasa, Monas, digadang-gadang bukan opsi satu-satunya karena masih dikoordinasikan. Seperti diketahui, selama pandemi ini reuni akbar 212 masih belum terlaksana kembali.

● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



AKSI PERUBAHAN IKLIM

Aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (10/11). Aksi mengantarkan 1.000 kartu pos dari masyarakat seluruh Indonesia kepada Presiden Joko Widodo yang disertai patung es seorang anak tersebut untuk mengingatkan adanya ancaman besar perubahan iklim.



FOTO: ANI

TUGU JAM THAMRIN

Kendaraan melintas di kawasan Tugu Jam Thamrin, Jakarta, Rabu (10/11). Cagar budaya Tugu Jam Thamrin akan dipindahkan ke kawasan Monumen Nasional karena adanya pembangunan MRT Jakarta fase 2A Bundaran HI sampai Stasiun Harmoni.

Pemprov DKI Normalisasi Kali Ciliwung

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI mewacanakan melakukan normalisasi Kali Ciliwung dalam waktu dekat. Wilayah yang bakal terdampak normalisasi itu kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Warga pun mengaku sudah pernah membahas hal itu.

"Ada 63 bidang di RT 03 RW 07. Warga tidak menolak asal pembayaran rumah sesuai atau di atas NJOP dan tanpa makelar," kata Ketua RW 07 Rawajati, Sari Budi Handayani, Rabu (10/11).

Menurut dia, warga Rawajati telah membahas persoalan wacana normalisasi itu bersama Lurah, Camat, Dinas SDA, dan pihak BPN tentang program normalisasi Kali Ciliwung beberapa waktu lalu. Paling tidak, ada 63 bidang yang bakal dikompensasi pemerintah wacananya.

Disebutkan, proyek normalisasi Kali Ciliwung itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di permukiman sekitar kali, salah satunya kawasan Rawajati.

Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin menerangkan, proses pengadaaan dan penertiban

pada bangunan yang ada di bibir kali Ciliwung itu masuk ranah Dinas SumberDaya Air DKI Jakarta. Saat ini, pemerintah tengah melakukan pendataan dan penelitian berkas bangunan dan lahan milik warga.

"Karena itu ada di wilayah Jakarta Selatan, Lurah khususnya yang terlibat di bawah. Kaitan dengan tanah atau kondisi masyarakat sekitar itu yang kita bantu," katanya. Sejauh ini dia belum tahu pasti jumlah bidang rumah di Rawajati, Pancoran yang nanti bakal direlokasi dari program normalisasi Kali Ciliwung.

Sebabnya, bukan hanya sejumlah bangunan rumah di Rawajati, tapi di wilayah Pejaten Timur, Pasar Minggu juga bakal direlokasi. "Kita tidak tahu persis bidangnya karena itu ada di wilayah Pejaten Timur dan ada yang di Rawajati, sepanjang Kali Ciliwung. Soal itu (rumah yang tak ada sertifikatnya) nanti ada mekanismenya, yang paham betul ada di UPT pengadaaan lahan di Dinas Sumber Daya Air, dia akan koordinasi dengan BPN," jelasnya. ● yan

Usaha Pariwisata Boleh Buka Maksimal 75% dari Daya Tampung

FOTO: HESTON LUBIS



Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bekasi, Encep S Jaya.

CIKARANG PUSAT (IM) - Meski masih dalam situasi pandemi Covid-19, namun saat ini Kabupaten Bekasi sudah berada di level pertama untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Jenis usaha pariwisata diizinkan beroperasi tetapi pengunjungnya dibatasi, maksimal 75% dari daya tampung.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah

Kabupaten Bekasi, Encep S Jaya di kantornya, Rabu (10/11). Kapasitas pengunjung dalam sektor usaha pariwisata saat ini, kata Encep, meningkat dari sebelumnya 50% menjadi 75%.

Pelaku usaha, sambungnya, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat meskipun Kabupaten Bekasi sudah pada posisi level satu.

Peningkatan ini, tambahnya berdampak positif terhadap pemasukan daerah.

Ia melanjutkan, berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 14, jenis usaha yang tergolong pariwisata yaitu, jasa perjalanan wisata, penyedia akomodasi, jasa makan dan minuman, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, daya tarik wisata, penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa permukiman, penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa konsultasi pariwisata, jasa informasi pariwisata, wisata tirta, spa, dan atraksi wisata. ● ton

Covid-19 Terkendali, DPRD DKI Minta Alokasi BTT Dipangkas

Saat ini biaya tidak terduga (BTT) tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan mengingat penularan Covid-19 di Jakarta yang relatif terkendali. Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, justru yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

JAKARTA (IM) - DPRD DKI Jakarta meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengkaji ulang alo-

kasi biaya tidak terduga (BTT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,2 triliun. Dengan kondisi Covid-19 yang sudah terkendali sebaiknya anggaran BTT tidak terlalu besar.

Pemintaan ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Rabu (10/11). Menurut Pras, saat ini BTT tidak perlu dialokasikan dengan besaran

yang signifikan mengingat penularan Covid-19 di Jakarta yang relatif terkendali.

Menurut Pras, justru yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

"Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca-Covid-19 seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada dibawah dinas," kata Pras di DPRD DKI, Rabu (10/11).

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyo mengatakan, Komisi A memiliki pagu anggaran Rp12,9 triliun dalam mendukung pemulihan ekonomi telah merekomendasikan kenaikan operasional dasawisma, jumatik, dan kader posyandu dalam laporan hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2022.

"Kami juga meminta agar pemberian makan tambahan (PMT) baik di posyandu ataupun di sekolah agar dapat memenuhi baku mutu dan higienis," kata Mujiyo.

Selanjutnya Komisi B DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp9,2 triliun, salah satu program yang direkomendasikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu, dengan begitu diharapkan pereko-

nomian warga lokal dapat meningkat.

"Bahkan seluruh dinas mitra Komisi B kami minta lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta," ujar Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Sedangkan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp5,8 triliun merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat Penyerahan Modal Dasar (PMD) dapat mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.

"Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat Covid-19," ungkap Yusuf, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Lalu Komisi D DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp16,3 triliun ini merekomendasikan agar DPRD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengutamakan pembangunan rusunawa dan rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.

Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp33,9 triliun ini merekomendasikan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk kader dasawisma, serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta. ● yan

Anies: Seluruh Pihak yang Terlibat Penanganan Covid-19 Adalah Pahlawan

JAKARTA (IM) - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Pahlawan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda DKI Jakarta di Halaman Balai Kota Jakarta, pada Rabu (10/11).

Dalam upacara tersebut, Gubernur Anies membacakan amanat Menteri Sosial RI tentang Hari Pahlawan yang bertemakan 'Pahlawanku, Inspirasiku'.

Anies berpesan, dalam memperingati Hari Pahlawan tahun ini, perlunya untuk mengambil hikmah dan memprioritaskan kepentingan umum serta kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Hal ini karena selama hampir dua tahun Pemprov DKI Jakarta turut memperjuangkan pengendalian Covid-19, yang memiliki dampak di berbagai aspek kehidupan.

"Kita merasakan sebuah krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi, sosial-

budaya, dan berbagai macam. Pada masa inilah kita menyaksikan begitu banyak pahlawan dan pribadi yang memilih untuk menyelamatkan sesama, dari mulai penanganan medis sampai yang mengurus pemakaman, memberikan pelayanan vaksinasi, hingga menyiapkan aplikasi untuk jutaan orang untuk bisa mendaftar vaksin," ujar Anies Baswedan.

Menurut Anies, semua yang terlibat dalam penanganan Covid-19, khususnya di DKI Jakarta adalah para pahlawan saat ini. Hal ini karena siapapun yang mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan dirinya, maka akan menimbulkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kita bisa melihat contohnya, ketika pendaftaran vaksin terasa begitu mudah, di balik itu semua ada yang bekerja tak pernah terlihat, tapi manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Itu adalah pahlawan kita. Hari ini kita

menyaksikan keluarga kita diantar ke rumah sakit, kemudian diantar ke rumah. Selama prosesnya belum tentu mereka saling lihat wajah, karena tertutup masker, APD, dan mereka jugalah para pahlawan kita," tutur Gubernur Anies.

Di samping itu, Gubernur Anies juga menerangkan bahwa Pemprov DKI akan membuat tradisi baru bahwa setiap 10 November akan memperingati Hari Pahlawan dengan berziarah ke makam MH. Thamrin, di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.

"Tadi pagi kami bersama Bamus Betawi melakukan ziarah ke makam MH. Thamrin. Kita mengenal MH. Tamrin menjadi nama sebuah jalan paling utama di pusat kota Jakarta. Insya Allah, ini akan jadi tradisi baru, bahwa setiap tanggal 10 November ada kegiatan ziarah di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, di sanalah Muhammad Husni Tamrin dimakamkan," pungkas Gubernur Anies. ● yan

Puskesmas Gambir Buka Pelayanan Vaksin



JAKARTA (IM) - Puskesmas kecamatan Gambir membuka pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi warga masyarakat yang datang di RPTRA Mustika, Jalan Petojo Selatan X RT 07/RW 11 Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/11).

Vaksinasi terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan imun tubuh guna mencegah virus Covid-19.

Pada kesempatan tersebut Tiga Pilar Kecamatan Gambir juga mengawasi protokol kes-

ehatan, agar vaksinasi berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

Turut serta dalam kegiatan vaksinasi tersebut Babinsa Koramil 04/Gambir, Serda Agus, Bhabinkamtibmas anggota Polsek Metro Gambir, Satpol PP Cideng dan Satpol PP Gambir, Sudin Kesehatan Jakarta Pusat.

Danramil 04/Gambir, Mayor Inf. Sisriyanto Ade Prasika mengatakan, kegiatan vaksinasi terus dilakukan hingga seluruh warga masyarakat

wilayah Kecamatan Gambir terlayani.

"Kegiatan vaksinasi ini akan terus dilakukan agar seluruh warga wilayah Gambir terlayani, guna menciptakan kekebalan lingkungan atau herd immunity," katanya.

Adapun vaksin yang tersedia jenis Pfizer dan Moderna untuk dosis pertama dari aplikasi Jaki, dengan kuota yang tersedia sebanyak 150 orang dan dilayani 6 orang nakes dipimpin dr Tika. ● ber

DEMO DI BALAI KOTA

Buruh Minta Anies Naikkan UMP 2022 Jadi Rp4,8 Juta

JAKARTA (IM) - Puluhan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi Rp 4,8 juta. Jumlah ini naik hingga 10% dari UMP DKI Jakarta 2021 ini.

"Kalau 7-10 persen, kita akan menjadi Rp 4,8 juta karena kita harus imbangin juga," ujar Ketua KSPI DKI, Winarso saat demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (10/11).

Saat ini, kata Winarso, UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4,4 juta. Padahal, kata dia, berdasarkan survei internal KSPI, besaran untuk kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta senilai Rp 5,3.

Namun, tutur Winarso, pihaknya memahami kesulitan yang dihadapi pengusaha di tengah pandemi Covid-19 sehingga hanya menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 7-10%.

"Kami juga melihat kesulitan dari pengusaha di masa pandemi maka ada angka negosiasi di situ antara 7 sampai 10%. Angka itu muncul karena memang sudah kita kalkulasi tentang proyeksi kebutuhan hidup pokok dari pekerja di tahun 2022," ungkap dia.

Winarso mengatakan, pihaknya berencana bertemu Gubernur Anies. Namun, jika Gubernur Anies tidak bisa ditemui, maka pihaknya akan

terus melakukan lobi dan komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI terkait tuntutan kenaikan UMP 2022.

"Tidak masalah (kalau tidak bisa bertemu Anies), toh kita juga ada yang namanya konsep lobi dan aksi, dan itu kita lakukan. Diskusi dan komunikasi tetap berjalan dengan pihak Pemprov DKI dan Dinas Tenaga Kerja," tandas dia.

Winarso juga minta Anies tidak perlu takut dengan berbagai intervensi pihak-pihak tertentu yang menahan-nahan kenaikan UMP 2022 tersebut. Termasuk, kata dia, intervensi dari Kementerian Dalam Negeri.

"Kita juga meminta agar gubernur itu tidak terintimidasi dan terintervensi Kemdagri yang memang menekan bahkan ada sanksi jika melanggar apa yang diinstruksikan Kemdagri," pungkas Winarso. ● yan

PENGUMUMAN

Bahwa akan dilakukan pengembalian hak lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. BUANA PERUSAHA ASRI, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan"). Keberatan disampaikan secara tertulis ke alamat di Jalan Galur Sari Raya Nomor 15, RT/RW : 005/007, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur.

dengan tembusan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 14 hari sejak pengumuman ini.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 11 November 2021

Direksi Perseroan

Catatan :
- rancangan pengembalian dapat diperoleh pada alamat Perseroan tersebut di atas.